

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA APBD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**

Soelistijono Boedi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin
Jalan H. Hasan Basry No.9-11 Banjarmasin 70123 Telp. 0511-3304652 Faks.0511-3305238

Artikel info

Keywords: Financial
Performance, Region Financial
Ratio, Banjar Regency
Government

Abstract

The objective of this research is to analyze the financial performance of local budgeting and expenditures (APBD) of Banjar regency government within the period of 2006 until 2010 based on region financial ratios. Data analysis technique used in this research is a descriptive quantitative technique analysis, which is a calculation based analysis in describing or revealing the level of financial capacity based on region financial ratios. The analysis process was started since field data collection. The collected data is in the form of financial statements. The financial statements are reviewed and categorized, to make it possible to be analyzed. Based on this research, the ongoing of five year budgeting & expenditures (APBD) of Banjar regency government showed a poor performance. It can be seen from the calculation and analysis of region financial ratios that shows a poor and tend to decrease percentage in each year. As the ratio of the percentage of revenue growth of 180.08 % in 2006 decreased to 31.95 % by the year 2010. It can be concluded that Banjar regency government has not been able to improve its financial performance for the region construction and development. It is suggested to find a potential revenue source as a strategic policy to increase local government revenue in order to improve government performance, and it is suggested to have appropriate economic development strategies in order to achieve the development vision and mission of Banjar regency government.

PENDAHULUAN

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Berdasarkan catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banjar tahun 2010, dalam lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2005 sebesar 5,49% dan pada tahun 2010 menjadi 6,18%. Hal ini dikarenakan adanya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor industri pengolahan, bangunan, perdagangan, restoran dan hotel, dan jasa-jasa. Sehingga keadaan masyarakat menjadi lebih baik dari adanya pemasukan tersebut. Pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana perimbangan.

Dari kedua jenis pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah lah yang menjadi perhatian karena banyak terkait dengan usaha dan kreatifitas daerah dalam menguskannya sedangkan pendapatan transfer rumusnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jadi Pemerintah Daerah tinggal menunggu saja berapa besar penetapan yang ditentukan pemerintah pusat. Sedangkan sisi belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial.

Kabupaten Banjar merupakan suatu objek penelitian yang menarik, dikarenakan daerah ini mempunyai sumbangan PAD yang besar menurut catatan atas laporan keuangan Kabupaten Banjar tahun 2010 dari hasil pertanian, pertambangan dan penggalian. Selain itu dari sektor kehutanan, perikanan, industri pengolahan, listrik dan air bersih, pembangunan, dan lainnya serta hasil dari retribusi dan pajak daerah yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga mampu meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan Kabupaten Banjar tahun 2010 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Banjar. Kontribusinya pada tiga tahun terakhir cukup besar (2007-2009), yaitu berkisar antara 23,81-25,82% dan hal ini cukup membanggakan karena sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah diukur dengan kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%, namun semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah pun akan semakin baik. Sebaliknya apabila rasio keuangan daerah dibawah 100% maka kondisi keuangan dikategorikan buruk atau tidak efektif.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam

membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menegaskan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran dituangkan dalam bentuk laporan keuangan daerah sebagai bentuk implementasi pusat pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD yang telah mengisyaratkan bahwa dimungkinkan adanya penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai informasi tambahan yang dapat melengkapi catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah, APBD dapat didefinisikan

sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran dimaksud (Halim, 2008,20).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa analisis perhitungan rasio keuangan daerah pada data laporan keuangan yang diambil berdasarkan laporan ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Neraca, dan Arus kas untuk periode 2006 sampai dengan 2010.

Teknik Analisis Data

Setelah data laporan ringkasan APBD diperoleh, maka selanjutnya dilakukan suatu analisis deskriptif. Menganalisis hasil kinerja keuangan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan ringkasan perhitungan APBD yang diperbandingkan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dengan menggunakan rasio-rasio berikut ini:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini mengukur besar kecilnya kemandirian suatu daerah, semakin tinggi rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi semakin rendah atau semakin baik (Halim, 2002).

2. Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas untuk menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan de-

ngan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah apabila rasio yang di capai lebih tinggi atau dicapai hingga 100 persen berarti kemampuan Pemda dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sangat baik (Halim, 2002).

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Menggambarkan aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Menggunakan rasio keserasian yaitu bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal apabila persentase belanja modal lebih besar maka rasio aktivitas akan menjadi lebih baik (Halim, 2002).

4. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Rasio ini Untuk mengukur berapa besar pinjaman pada pemerintah pusat dan berapa total pengembalian yang wajib dikembalikan dan maksimal angsuran pokok pinjaman = tidak boleh meminjam lagi karena *DSCR* di bawah 2,5 (Halim, 2002).

5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2002).

6. Rasio Tingkat Ketergantungan

Haryadi (2002) mengemukakan bahwa tingkat ketergantungan adalah tingkat untuk mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Apabila semakin tinggi persentase Rasio ketergantungan berarti semakin baik artinya tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat sangat mengecil.

7. Rasio Desentralisasi Fiskal

Haryadi (2002) mengemukakan bahwa ukuran ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

melaksanakan pembangunan. Ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Tingkat Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan salah satu rasio yaitu, Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, apabila persentase rasio Fiskal ini lebih tinggi berarti menjadi sangat baik.

8. Rasio Ruang Fiskal Daerah

Rasio Ruang Fiskal Daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Salah satu cara untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio-rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan ini adalah menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010. Dari hasil penelitian ini diketahui apakah Pemerintah Kabupaten Banjar berhasil atau tidak dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk melaksanakan analisis tersebut maka dilakukan perhitungan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode yang sebelumnya.

Tabel 1. Ringkasan Rasio-Rasio Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2006 s.d. 2010

No	Rasio	2006	2007	2008	2009	2010	Keterangan
1	Kemandirian Keuangan Daerah	9,2%	9,1%	5,8%	5,4%	6,9%	Cenderung Rendah Sekali
2	Efektivitas PAD	107,9%	120,4%	111,2%	106,4%	133,7%	Sangat Efektif
3.a	Aktivitas Belanja Operasi	70,8%	68,7%	74,3%	69,5%	72,3%	Cenderung Meningkat
3.b	Aktivitas Belanja Modal	28,3%	30,6%	25,2%	29,8%	27,3%	Cenderung Menurun
4	DSCR	2,05	0,83	0,09	0,95	0,93	Cenderung Menurun
5.a	Pertumbuhan PAD	180,08%	13,78%	(21,91%)	8,10%	31,95%	Menurun
5.b	Pertumbuhan Pendapatan	54,89%	14,32%	20,33%	14,51%	4,59%	Rendah
5.c	Pertumbuhan Belanja Operasi	23,63%	28,24%	29,79%	10,76%	8,92%	Menurun
5.d	Pertumbuhan Belanja Modal	223,87%	42,98%	(1,12%)	39,91%	(4,23%)	Rendah
6	Tingkat Ketergantungan	29,08%	30,85%	16,68%	12,66%	14,37%	Cenderung Kurang Baik
7	Desentralisasi Fiskal	8,33%	8,29%	5,38%	5,08%	6,40%	Sangat Kurang Baik
8	Ruang Fiskal Daerah	58,30%	46,32%	40,84%	38,57%	27,17%	Menurun

Sumber: APBD Pemerintah Kabupaten Banjar (data diolah kembali), 2012.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan rasio diatas dapat tergambar jelas perubahan yang terjadi pada APBD tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010 sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan, bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan APBD ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian), *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Pertumbuhan, Rasio Tingkat Ketergantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ruang Fiskal Daerah,

Adapun Ringkasan secara keseluruhan dari rasio-rasio diatas ditunjukkan dalam tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa selama 5 (lima) tahun berjalan, tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membiayai sendiri APBD setiap tahunnya dikategorikan cenderung rendah sekali. Walaupun efektifitas pendapatan asli daerahnya dikategorikan sangat efektif tetapi tetap tidak sebanding dengan tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk 5 (lima) tahun terakhir pada rasio aktivitas, Pemda Kabupaten Banjar lebih banyak memprioritaskan APBDnya pada belanja operasi. Tidak ada dasar yang pasti besarnya rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dari perhitungan dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemda Kabupaten Banjar digunakan untuk belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Pertumbuhan APBD Pemda Kabupaten

Banjar dari tahun 2006 sampai dengan 2010 menunjukkan kurang baik, karena belum mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun.

Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal menggambarkan Pemda Kabupaten Banjar belum berhasil menjalankan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan, karena tingkat desentralisasi fiskal selama 5 (lima) tahun terakhir selalu dibawah 10 (sepuluh) persen.

Kemampuan Pemda Kabupaten Banjar dalam melakukan pinjaman setiap tahunnya cenderung menurun, dan Rasio DSCR selalu dibawah 2,5. Untuk ruang fiskal daerah Pemda Kabupaten Banjar harus berusaha lebih keras lagi meningkatkan pendapatan daerahnya, agar dana yang masih bisa digunakan secara bebas semakin besar karena selama lima tahun mengalami penurunan.

PENUTUP

Simpulan

Kemandirian Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, modal dan pelayanan masyarakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan atau rendah sekali. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sebesar 9,2%, tahun 2007 9,1% sedangkan 2008 dan 2009 menurun sekali menjadi 5,8% dan 5,4%. Walaupun pada tahun 2010 menunjukkan kenaikan menjadi 6,9%. Tetapi Rasio Kemandirian Keuangan daerah masih dikategorikan rendah sekali apabila berada pada persentase dibawah nilai pencapaian 25%.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dinyatakan sa-

ngat efektif. Hal itu terlihat dari rasio efektivitas yang menunjukkan bahwa persentase pada tahun 2006 sebesar 107,9%, tahun 2007 sebesar 120,4%, tahun 2008 sebesar 111,2%, tahun 2009 sebesar 106,4%, dan persentase pada tahun 2010 sebesar 133,7%. Jika tingkat rasio efektivitas sudah mencapai minimal satu atau seratus persen dinyatakan bahwa pemerintah tersebut sudah mampu menjalankan tugasnya, dalam merealisasikan penerimaan dan pendapatan asli daerahnya.

Rasio aktivitas yang menggunakan rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya, pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio aktivitas kurang baik, karena persentase belanja modal selama periode lima tahun masih lebih kecil dari persentase belanja operasi.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR), berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya selalu dibawah 2,5 dan selama 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Apabila DSCR diatas 2,5 maka Pemda masih bisa melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank dan lainnya.

Rasio Pertumbuhan dari rincian perhitungan tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 yaitu untuk PAD menurun, dari persentase tahun 2006 sebesar 180,08% sampai dengan 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar 31,95%. Untuk pertumbuhan pendapatan menjadi sangat rendah, karena pada tahun 2006 mencapai 54,89%. Sedangkan tahun 2010 menjadi 4,59%. Pertumbuhan Belanja Operasi juga menurun, dari 2006 sebesar 23,63% menjadi 8,92% pada tahun 2010. Pertumbuhan Belanja Modal menjadi sangat rendah pada tahun 2010

menjadi -4,23%, karena pada tahun 2006 mencapai 223,87%.

Jika semakin tinggi rasio tingkat ketergantungan, maka semakin pandai pemerintah dalam meningkatkan PADnya, tetapi sebaliknya. Rasio tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan cenderung kurang baik, karena Pemerintah belum mampu menaikkan pendapatan asli daerahnya dari tahun ketahun.

Rasio Desentralisasi Fiskal, menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Pada tahun 2006 sebesar 8,33%, tahun 2007 PAD memberi kontribusi sebesar 8,29%, tahun 2008 sebesar 5,38%, tahun 2009 sebesar 5,08%, sedangkan pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan sebesar 6,40% dari total pendapatan. Jumlah kontribusi PAD terhadap pendapatan setiap tahunnya mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2010 mengalami kenaikan, tetapi tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak dibiayai oleh dana transfer dari pemerintah pusat artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Ruang Fiskal daerah menunjukkan dana yang masih bisa digunakan secara bebas setiap tahunnya, menurut perhitungan bahwa ruang fiskal Kabupaten Banjar setiap tahunnya semakin menurun. Sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar harus berusaha lebih keras lagi meningkatkan Pendapatan Daerahnya.

Kinerja keuangan Pemda Kabupaten Banjar tahun anggaran 2006 hingga 2010 bisa disimpulkan masih bergantung pada pemerintah pusat, walaupun efektivitas PADnya dikategorikan sangat efektif. Tetapi tingkat kemandirian dikategorikan rendah sekali, sehingga Pemda Kabupaten Banjar diharapkan agar berusaha lebih keras lagi mening-

katkan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerahnya seperti Pajak dan Retribusi Daerah, sektor Pertambangan serta sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya dengan mempertimbangkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Agar bisa lebih mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan agar difungsikan lebih efektif dan efisien serta merealisasikan pada hal yang sifatnya sosial, hingga masyarakat kabupaten Banjar benar-benar merasakan potensi Pemda dalam mengalokasikan dana yang ada dengan cara lebih mengutamakan pengendalian dan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Banjar dihimbau agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penggalan potensi sumber pendapatan serta melakukan strategi pembangunan ekonomi yang tepat guna untuk mencapai visi dan misi dari pembangunan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001 *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
- DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2010*. www.djpk.depkeu.go.id, diakses 21 Maret 2012.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Salemba Empat Jakarta.
- , 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Haryadi, Bambang, 2002. *Analisis Pengaruh Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Simposium Nasional akuntansi V tanggal 5-6 September 2002 di Semarang.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Banjar, 2006-2010 Ringkasan perhitungan APBD Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Banjar, 2006-2010 Laporan Neraca Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Banjar, 2006-2010 Laporan Arus Kas Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Banjar, 2010, RPJMD Tahun 2011-2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. www.sjdih.depkeu.go.id, diakses 20 Maret 2012.